

Kelangkaan Meningitis Hambat Jemaah Umrah Bulan Depan, Menkes Mau Datangkan 250 Ribu Dosis

KELANGKAAN vaksin meningitis dianggap sebagai faktor penghambat calon jemaah umrah. Pemerintah bakal segera memenuhi kebutuhan vaksin tersebut bulan depan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bakal menyiapkan 250 ribu dosis vaksin meningitis pada awal Oktober 2022, untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah daerah.

Pengadaan ratusan ribu dosis vaksin itu sudah berdasarkan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Ada 250 ribu, nanti awal Oktober sudah dapat persetujuan BPOM, baru akan diberikan," ujar Budi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kelangkaan vaksin meningitis di sejumlah wilayah Indonesia terjadi karena produsen bekerja sama dengan Kemenkes belum bisa memenuhi permintaan Pemerintah.

Saat ini, terdapat tiga pemasok vaksin meningitis halal di Indonesia, yaitu Bio Farma, Sanofi dan PT Mersifarma.

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, kelangkaan vaksin meningitis di Indonesia disebabkan proses produksi vaksin membutuhkan waktu cukup lama, yakni 5-6 bulan.

Selain itu, banyak negara dalam beberapa tahun terakhir fokus di penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, Honesti menyebut ibadah umrah yang menyaratkan calon jemaah sudah divaksin meningitis-juga baru dibuka kembali belakangan ini di tengah pandemi.

"Tapi *alhamdulillah* kemarin sudah datang 150 ribu dosis, dan akan datang lagi secara bertahap. Totalnya sampai Desember ada 600 ribu dosis yang datang," tuturnya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

(P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, salah satu vaksin meningitis yang sudah memperoleh izin edar dari BPOM tidak bisa melanjutkan produksi untuk sejumlah kelompok vaksin, lantaran suatu hal.

"Sedang dalam proses pemenuhan *upgrade* CAPA praakreditasi WHO, sehingga produksi vaksin dari produsen vaksin tersebut tidak dapat dipenuhi," kata Maxi, di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Maxi memastikan telah mengupayakan berbagai hal guna memenuhi kebutuhan vaksin meningitis di Indonesia.

Pertama, Kemenkes mulai mengidentifikasi kondisi stok vaksin meningitis di seluruh Indonesia, baik yang ada di Dinas Kesehatan maupun Kantor Kesehatan Pelabuhan.

"Serta telah dilakukan relokasi tersebut ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang tingkat layanan vaksinasinya cukup banyak sasaran," jelasnya.

Kedua, Kemenkes telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama dan Asosiasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah RI (AMPHURI), untuk menyampaikan tentang pentingnya pelaksanaan vaksinasi meningitis dan kondisi terkini tentang layanan vaksinasi swasta.

Pelayanan vaksinasi diprioritaskan pelayanan bagi jemaah yang waktu berangkatnya sudah dekat. Agar mereka mendapatkan waktu cukup untuk pembentukan antibodi.

Upaya ketiga, Kemenkes telah berkoordinasi dengan PT Bio Farma dan BPOM untuk memenuhi kebutuhan vaksin meningitis.

Dari hasil koordinasi yang dilakukan telah diperoleh tambahan vaksin sebanyak 225 ribu dosis vaksin meningitis dari PT Bio Farma. ■ DIR



SALAMAN: Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemanfaatan riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Hendrian (kiri) bersalaman dengan Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Panji W Ruky, disaksikan Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Nugroho Cristijanto (kiri) usai peluncuran roadmap riset klaster pupuk periode 2022-2023 di Jakarta, kemarin.

Semua Negara Lagi Susah

RI Siap Sapu Bersih Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa terselesaikan pada 2024. Target ini luar biasa. Soalnya, di saat yang sama, banyak negara sedang dihantam krisis.

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, target tahun 2024 golongan miskin ekstrem atau mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, tidak akan ada lagi.

Cara yang dilakukan, yakni mengendalikan harga kebutuhan pokok serta pemberian bantuan sosial (bansos).

"Maka penyalurannya (bansos) perlu dipercepat. Langkah itu perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dan menjaga daya beli masyarakat," kata Luhut.

Hal itu disampaikan dalam acara Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda di Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, tingkat kemiskinan non-ekstrem pada tahun 2022 berada di kisaran 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa. Angka ini turun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa.

Di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19, Pemerintah juga sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong perputaran roda ekonomi di tengah masyarakat.

Hasilnya, berdasarkan laporan Pemerintah, tercatat tingkat kemiskinan ekstrem berhasil ditekan. "Tingkat kemiskinan ekstrem juga menurun pada data Maret 2022," cetus Luhut.

Untuk angka kemiskinan ekstrem, berkurang hingga 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Menurun dari data Maret tahun 2021 sebesar 2,14 persen atau

5,8 juta jiwa. Menyelesaikan angka kemiskinan merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemerintah menargetkan pada 2024 angka kemiskinan bisa dihapus sampai bersih.

Untuk melakukan pencapaian percepatan SDGs dari 2030 menjadi 2024, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem setidaknya 1 persen setiap tahun.

"Sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0 persen pada tahun 2024," tuturnya.

Untuk itu, Inpres 4 Tahun 2022 menegaskan 28 kementerian, lembaga dan seluruh Pemerintah Daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Pusat, lanjut Luhut, telah menetapkan tiga instrumen kebijakan yang saat ini telah berjalan.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 hingga 2024.

Kedua, ketersediaan data atau Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan angka Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi.

"Ini harus dilakukan untuk memudahkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan intervensi lebih akurat," katanya.

Ketiga, penetapan pedoman umum percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi Kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Strategi penghapusan kemiski-

nan ekstrem terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan yang tengah dikawal oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbudhumanas).

"Sedangkan Kemendikbudhumanas mengawal strategi peningkatan pendapatan," ucapnya.

Sebelumnya, Luhut juga menyampaikan, inflasi indeks harga konsumen pada Agustus 2022 melambat menjadi sebesar 4,69 dibanding Agustus tahun lalu.

Ini seiring terkendalnya inflasi seiring terkendalnya inflasi *volatile food*.

"Ini disebabkan peningkatan pasokan dari sentra produksi dan ekstra *effort* pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah," beber Luhut.

Namun demikian, dia mengatakan, risiko inflasi, termasuk harga pangan strategis perlu menjadi perhatian terutama pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai BBM tahap satu. Total anggaran Rp 5,6 triliun, yang telah disalurkan sebesar 96,6 persen atau 19,95 juta keluarga penerima manfaat.

Penyaluran bantuan subsidi upah juga terus berjalan dan disalurkan lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3 persen.

Selanjutnya, pada Oktober mendatang, Pemerintah Daerah akan merealisasikan penguasaan dua persen dana transfer umum.

Terkait penggunaan belanja tidak terduga dapat kami laporkan bahwa rata-rata realisasi di tingkat provinsi baru tercapai 11,23 persen. Lalu di tingkat kabupaten/kota sebesar 15,69 persen. ■ JAR

Dukung Mobilitas Hunian TOD Semakin Dilirik Untuk Gaya Hidup Sehat & Hemat

AWAL September ini, Pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Berdasarkan hitungan Pemerintah, kenaikan harga ini akan menambah inflasi 1,8 persen dan membuat biaya hidup membengkak.

Hal ini juga berimplikasi pada pemilik kendaraan pribadi yang terbiasa menggunakannya untuk bekerja. Alhasil, ketimbang memaksakan diri menggunakan kendaraan pribadi yang memberatkan kantong, ada baiknya menggunakan transportasi publik seperti TransJakarta, LRT, MRT atau KRL.

Selain menghemat anggaran karena tidak harus membeli bensin yang harga lumayan tinggi, mengeluarkan biaya tol, parkir, langkah itu juga bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Kemacetan yang parah dan polusi udara akibat padatnya kendaraan bermotor menjadi masalah klasik kota-kota besar, seperti di Jakarta.

Analisis Perencanaan Subbidang Perkeretaapian, Deputian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet Mayke Kristika Antony Putri mengatakan, semakin kompleksnya kemacetan lalu lintas dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan akibat konsumsi BBM, memerlukan solusi konkret.

Dengan begitu, dapat meminimalkan ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan pemanfaatan transportasi publik.

Salah satu solusinya, merancang pembangunan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

"Konsep TOD mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan dan ruang publik. Melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki atau bersepeda, serta terintegrasi dengan transportasi publik ke seluruh kota," kata Mayke, kemarin.

Konsep Kawasan Berkelanjutan merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Mayke mengatakan, konsep kawasan TOD merupakan perancangan kota yang berkelanjutan untuk masyarakat. Ini dapat menjadi alternatif perancangan kota untuk pertubahan perekonomian daerah. Karena menggabungkan area hunian dengan komersial.

Dia menjelaskan, perkembangan kota yang berorientasi TOD berpotensi mengurangi kantong, ada baiknya menggunakan transportasi rumah tangga, dan mengatasi permasalahan lingkungan.

"Prinsip TOD menempatkan sarana komersial, perumahan, perkantoran, fasos dan fasos dalam jarak tempuh dekat. Beberapa negara di Amerika Latin, Jepang, Hong Kong dan Singapura sudah menerapkan konsep hunian TOD," ungkapnya.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menjelaskan, konsep TOD memiliki sejumlah manfaat. Seperti, meningkatkannya angka pemakaian transportasi publik. Sehingga tingkat kemacetan menurun karena jumlah kendaraan tidak lagi melebihi kapasitas jalan.

Sekaligus, meningkatkan kualitas lingkungan karena penggunaan bahan bakar dan emisi berkurang.

Di Indonesia, Implementasi konsep TOD ini sudah dilakukan pada 2015, ketika jalur Mass Rapid Transit (MRT) pertama kali dibangun di Jakarta. Dan berkembang hingga kini ketika Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek Tahap I dipersiapkan untuk beroperasi komersial tahun depan.

Pemerintah juga bekerja sama dengan stakeholder untuk membuat kawasan TOD dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan di sekitar stasiun, untuk pengembangan properti dengan kepadatan tinggi.

Hal ini diharapkan menjadi jawaban atas masalah kemacetan, polusi udara dan ekonomi. Dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang berada di Jabodetabek melakukan aktivitas. ■ DIR

MENANG LAWAN COVID-19
#BersatuLawanCovid19#PakaiMasker#AyoVaksin

Ingat! Covid Masih Berstatus Darurat

KASUS Covid-19 memang sudah terkendali. Kendati begitu, bukan berarti kewaspadaan bisa ditanggalkan.

Pt Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Prima Yosephine menegaskan, Covid-19 di Indonesia masih tergolong darurat.

Hal itu dilihat dari status pandemi yang hingga saat ini belum dihapus. Tak hanya Indonesia, di berbagai negara, Covid-19 masih dianggap pandemi.

"Perlu sikap kewaspadaan kita dengan mematuhi protokol kesehatan (prokes)," ujar Prima dalam diskusi virtual, kemarin.

Penularan yang masih terus berlangsung bisa saja melahirkan varian baru. Hingga terjadinya lonjakan penularan.

Dia bilang, tidak hanya protokol kesehatan (prokes), tapi vaksinasi masih sangat diperlukan. Selama Covid-19 masih berstatus pandemi, maka vaksin seharusnya masih dibutuhkan.

Seluruh masyarakat harus mendapatkan vaksin. Ini untuk mengantisipasi jika suatu saat Covid-19 kembali terjadi lonjakan.

"Kita masih dalam keadaan darurat Covid. Vaksin masih diperlukan masyarakat," ucapnya.

Walaupun mungkin angka kematian tidak setinggi seperti puncak Covid di tahun lalu, tapi potensi terjadinya lonjakan tetap harus diwaspadai dengan melakukan vaksinasi dosis pertama, kedua, hingga penguat atau *booster*.

"Jadi, sekarang memang lumayan bisa kita kendalikan tapi masih darurat," tegas Prima.

Dia memahami, sebagian masyarakat masih ada yang ingin disuntikkan dengan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dia memastikan, Pemerintah tetap berupaya menyediakan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI.

Prima pun mengingatkan masyarakat segera melakukan vaksin penguat meski kasus Covid-19 di Indonesia sudah melandai.

"Kendala kita saat ini, ternyata atensi masyarakat dengan landainya kasus Covid-19 menyebabkan atensi melakukan vaksin booster juga menjadi turun," beber Prima.

Menurutnya, kasus Covid-19 menyebabkan sebagian besar masyarakat merasa keadaan sudah aman dan vaksin booster dirasa bukan menjadi kebutuhan mendesak.

Meski Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, mendorong masyarakat suntik vaksin dosis booster.

Salah satunya, mengeluarkan kebijakan yang wajib menunjukkan syarat untuk vaksin booster dalam berbagai kegiatan.

"Sekarang booster sudah banyak dijadikan syarat perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta *entry* atau masuk ke fasilitas-fasilitas publik lainnya," tutur Prima.

Meski demikian, antusias publik tidak juga meningkat. Padahal, vaksin booster tak kalah penting dari vaksin pertama dan kedua untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah dampak yang parah akibat infeksi Covid-19.

Prima mengatakan, percepatan untuk vaksin booster Covid-19 menjadi kerja sama bagi seluruh pihak. Tak hanya Pemerintah, juga masyarakat secara luas.

"Jadi, melandainya kasus Covid-19 bukan berarti pandemi sudah berakhir," ungkapnya.

Prima mengingatkan, Covid-19 tidak akan hilang sekalipun status pandemi sudah dihentikan. ■ JAR



TABUR BUNGA: Istri Almarhum Sabam Sirait, Sondang Sidabutar (pakai kursi roda) didampingi putra-putri, cucu dan para tokoh bangsa, hadir dalam tabur bunga mengenang satu tahun Sabam Sirait di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.

